

## PEMBERITAAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN 17 APRIL 2019 DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO

<sup>1</sup>Miqdarullah, <sup>2</sup>Musfialdy

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [miqdarullah@gmail.com](mailto:miqdarullah@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan framing Berita Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden di Media Online Tempo.co pada 17 April 2019. Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teori analisis framing yang dikemukakan oleh Robert Entman yang memiliki empat perangkat yaitu, Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement dan Treatment Recommendation. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah analisis framing, Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi, dan teknik analisa data yang digunakan adalah analisis framing berdasarkan model Robert Entman. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya berita mengenai Pemilihan Presiden yang disajikan Tempo.co. ditinjau dari Define Problem, ialah Persaingan antar kedua kubu untuk menjadi pemenang pada Pilpres periode 2019-2024. Dari Diagnose Causes, yaitu Prabowo tidak menerima hasil dari lembaga survey yang dimenangkan oleh Jokowi dan Jokowi bersih keras dengan kevalidan quick countnya. Adapun Make Moral Judgement, Kedua Kubu Capres menjadi pusat perhatian dengan segala cara untuk mempertahankan kebenarannya. Dilihat dari Treatment Recommendation, Media Online Tempo.co telah memaparkan sejelas mungkin bagaimana problem dari kedua kubu.

**Kata kunci:** Framing, Berita, Pasca Pemungutan Suara, Pemilihan Presiden, Media Online, Tempo.co

### Pendahuluan

Media massa merupakan wadah penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat agar bisa mengikuti perkembangan terbaru. Saat ini perkembangan media massa berkembang pesat. Berbagai bentuk media massa muncul, seperti media cetak, televisi, radio dan daring (dalam jaringan). Begitu juga dari media yang mempertahankan kualitas berita, kenetralan sampai media yang banyak menyebar berita hoax. Terlebih lagi di tahun politik ini, media menjadi sarana penting dalam menaikkan elektabilitas calon legislatif dan pasangan calon presiden atau menjatuhkan pasangan calon lain.

Sejak dulu, Media dan politik saling berhubungan satu sama lain. Sebelum Ilmu Politik menjadi disiplin ilmu, kedua hal tersebut sudah terjalin dengan baik. Bahkan para ahli ilmu sosial menjadikannya kajian untuk studi ilmu politik saat itu. Begitu juga saat pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) presiden (Pilpres) dan legislatif tahun 2019 hingga satu minggu kedepan, pemberitaan media akan lebih menyoroti bagaimana hasil dari pemilu tersebut.

Pada tahun 2019, Indonesia melaksanakan dua pemilu serentak yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pers mengambil peranan penting dalam memberi informasi tentang kedua Pemilihan umum (Pemilu) tersebut. Dalam pemilihan legislatif terdapat banyak calon dari beberapa tingkatan, baik itu DPRD Kota, Provinsi dan Pusat (DPR RI). Sedangkan, pada Pilpres hanya ada dua pasang calon (Paslon) yaitu Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno. Antara Pilpres dan Pileg masyarakat lebih banyak menyoroti Pilpres dibanding Pileg. Hasil Survei Charta Politika, 72,3% pemilih akan terlebih dahulu mencoblos siapa pasangan capres-cawapres, setelah itu baru memilih caleg. Terlebih saat labelisasi pendukung salah satu paslon Presiden 2019.

Penyebutan cebong terhadap pendukung Joko Widodo dan kampret kepada pendukung Prabowo Subianto. Menurut Wawan Masudi, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada mengatakan sebutan/labelisasi cebong dan kampret yang diterapkan masyarakat dalam mengelompokkan perbedaan pilihan politik masyarakat, cukup menghangatkan situasi politik menjelang Pemilihan Umum. Melihat fenomena di media sosial, baik Facebook, Instagram, atau Twitter, saling komentar mengomentari antar dua kubu sudah dianggap biasa. Saling memberi label nama hewan cebong dan terlebih munculnya nama atau sebutan pendukung bagi salah satu pasangan calon (Paslon), menambah gejolaknya Pilpres tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyediakan 5 kali Debat antar dua paslon ini. Setiap debat selalu menyuguhkan komentar-komentar dari masyarakat terhadap argumen yang disampaikan oleh masing-masing Paslon.

Dalam bergejolaknya Pilpres 2019, pers menjadi bagian penting dalam memberi informasi terkait Pilpres. Semua media mengambil peranan, tidak terkecuali dengan Media Tempo. Sejak 2001, Tempo dengan sajian berita yang berkualitas. Mereka berupaya menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang. Memiliki prinsip, enak dibaca dan perlu, bahkan jenaka pun bisa. PT. Tempo Inti Media Tbk lahir sebagai perusahaan media nasional yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tanggal 8 Januari 2001. Tempo mempunyai sejarah yang cukup panjang, Bermula Tempo didirikan oleh Goenawan Mohamad beserta rekan – rekannya yakni Fikri Jufri, Christianto Wibisono dan Usamah dengan pertama kali meluncurkan majalah mingguan pada tanggal 06 Maret 1971. Dengan rata –rata umur pengelola yang masih terbilang muda, Tempo tampil beda dengan peliputan berita yang jujur dan berani, menggunakan bahasa yang kritis dan diterima khalayak umum. Pada mulanya pendiri Tempo lebih memfokuskan pada sajian informasi yang akurat, faktual, terpercaya dan berimbang, dan seiring perkembangan zaman Tempo dengan pesat menjadi perusahaan yang mampu berkembang dengan cepat dan terpercaya di Indonesia.

Pada zaman orde baru Tempo dianggap terlalu tajam, dalam mengkritik pemerintahan dan alhasil pada tahun 1982, Tempo kali pertama dibredel pemerintah. Seiring perkembangan zaman Tempo semakin eksis dan tumbuh pesat, perkembangan internal keredaksian semakin jaya, semangat jurnalisme dan investigasi semakin menjadi - jadi, daya kritik terhadap pemerintah pun tidak ketinggalan, dan tibalah pada puncaknya Juni 1994 Tempo dibredel oleh pemerintah untuk kedua kalinya melalui menteri penerangan Harmoko sebagai pengontrol pers, pada saat itu Tempo dibredel untuk kedua kalinya karena dinilai gaya kritiknya yang tajam dan pedas terhadap pemerintahan Soeharto dan Habibie terkait dengan pembelian kapal-kapal bekar dari Jerman Timur.

Selepas di bredel oleh pemerintahan pengelola Tempo menjadi tercerai- berai, tetapi setelah itu mereka kembali bergabung lagi dan alhasil Tempo hadir kembali, pada tanggal 12 Oktober 1998 majalah Tempo terbit kembali, semakin berkembangnya zaman. Tempo semakin tumbuh pesat pula setelah terbit majalah Tempo, kemudian pada tahun 2001 lahirlah koran Tempo yang berkompetisi di media harian.

Tidak hanya itu Tempo juga banyak menghadirkan produk – produk baru seperti Tempo English Edition (TEBI) yang berisi tentang sebagian laporan yang diambil dari edisi Indonesia dan sisipan khusus Asia Views sejak Januari 2004 dengan bekerja sama dengan Today (Singapura), Daily (China), Taipe Times (Taiwan), News Break (Filipina), The Asahi Shimbun (Jepang) dan lain – lain.

Penerbitan ini didukung oleh Sasakawa Peace Foundation, TEBI juga di distribusikan di negara – negara tersebut, selanjutnya adalah Travelounge yang dikonsep dengan panduan perjalanan bisnis dan wisata di Indonesia maupun Internasional, sebagai panduan perjalanan dan destinasi Travelonge juga sangat rinci, iadi lengkapi dengan travel info plus informasi

tentang jadwal penerbangan serta ragam layanan di bandara udara, selain itu juga ada versi digital seperti Tempo.co, Tempo News Room, kantor berita yang berfungsi sebagai pusat berita media Group Tempo. Tempo juga mencoba menembus bisnis televisi dengan mendirikan Tempo TV, kerjasama dengan kantor berita radio KBR68H, yang tidak kalah penting juga adalah Tempo bekerjasama dengan PT. Temprint yang mencetak produk.

Berangkat dari sejarah Tempo yang berulang kali dibredel karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik pemerintahan, menjadikannya salah satu media yang independen dan terpercaya di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji kualitas media online Tempo dari pembingkai berita (framing). Objek yang dikaji mengenai pemberitaan tentang pasca pemilihan umum Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Jadi fokus penelitian tertuju pada bagaimana media online memberitakan calon Presiden yang terpilih sebagai Presiden dan pemberitaan pada calon yang kalah dalam pertarungan pemilihan Presiden. Penelitian mengkaji pemberitaan pasca pemilihan presiden 2019 mulai tanggal 17 April – 21 April 2019.

Pada periode ini pemberitaan pemilihan presiden sedang hangat-hangatnya menyoroti hasil dari pemungutan suara tersebut. Sebuah teori dibutuhkan dalam setiap penelitian, maka penulis perlu menjelaskan teori yang berhubungan terhadap penelitian ini. Berikut pengertian teori menurut para ahli: (1) William Wiersman mengungkapkan bahwa teori adalah kumpulan generalisasi yang difungsikan dalam menjelaskan fenomena secara sistematis dan terukur; (2) Menurut Karlinger teori ialah definisi, seperangkat konsep, dan proposisi yang berguna dalam menyoroti fenomena secara sistematis, dari spesifikasi hubungan antara variabel, agar dapat difungsikan dalam menjelaskan fenomena; dan (3) Cooper and Schibdlar menjelaskan bahwa teori adalah sekumpulan konsep. Berdasarkan ketiga teori tersebut bisa penulis simpulkan bahwa, teori adalah sebuah konsep yang memiliki sifat general atau umum, yang bisa digunakan dalam mengungkapkan satu fenomena bahkan lebih.

### **Agenda Setting**

Agenda adalah beberapa isu yang dikomunikasikan dalam beberapa tahapan kepentingan dalam kurun waktu tertentu. Agenda biasa dikenal dengan sebutan “set of issues that are communicated in hierarchy of importance at a point in time”. Agenda Setting juga merupakan proses dalam kompetisi yang sedang terjadi antara issues proponents untuk memperebutkan perhatian media, publik dan elit-elit pembuat kebijakan. Berikut merupakan pengertian teori Penentuan Agenda atau Agenda Setting menurut para ahli : a. Menurut McComb dan Donald L. Shaw, teori agenda setting berasumsi bahwa media memiliki kemampuan mentransfer isu untuk mengubah agenda publik<sup>15</sup> . b. Kurt Lang dan Gladys Engel Lang mengatakan, “Media massa memaksakan perhatian ke isu-isu tertentu. Media massa membuat citra publik mengenai figur-figur politik. Media massa secara konstan mengarahkan apa yang hendak dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat<sup>16</sup> Teori penentuan agenda atau teori Agenda Setting ialah teori yang menyatakan bahwa media massa berfungsi sebagai pusat pemilihan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi melalui agenda publik dalam mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya dengan isu-isu yang dianggap penting bagi media massa.

### **Metode**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dalam suatu penelitian tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi<sup>17</sup>. Metode ini lebih memfokuskan pada observasi dan suasana alamiah, dalam hal ini peneliti bertugas sebagai pengamat.

Sedangkan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti obyek yang alamiah, dimana pada metode ini penulis sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini akan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>18</sup> Dalam hal ini, penulis menggabungkan teknik triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data dokumentasi dengan teknik triangulasi data teori yang bersumber kepada literatur sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Metode kualitatif dilakukan dengan menalisis data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dideskriptifkan dengan kata-kata ataupun lisan. Pendekatan deskriptif- kualitatif nantinya akan mendapatkan pendeskripsian yang sangat tajam karena menggunakan analisis kualitatif. <sup>19</sup> Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif framing pemberitaan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019 di media online Tempo.co penulis akan memantau dan memaparkan bagaimana media online Tempo.co mbingkai suatu kejadian dan penulis akan mendeskriptifkan secara mendalam.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebagai tempat sarana mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu.<sup>20</sup> Pemilu juga dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu Negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

### **Azaz Pemilu**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- 2) Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- 3) Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- 4) Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- 5) Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah serangkain pemilu yang “dikuasai” oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan system pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak persoalan.

Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>24</sup> Penyelenggaraan pemilu pada awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Pemilu terakhir yang telah dilaksanakan yakni pemilu tahun 2014 kemarin, dengan pelaksanaan terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia, pada tahun 2019 mendatang, akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004.

## Simpulan

Pada pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing pemberitaan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden di Media Online Tempo.co pada 17 April sampai 21 April 2019. Penulis menyimpulkan berdasarkan teori: Pertama Pendefinisian Masalah/ Define Problem, ialah Persaingan antar kedua kubu untuk menjadi pemenang pada Pilpres periode 2019-2024. Kedua sumber masalah/

Diagnose Causes, yaitu Prabowo tidak menerima hasil dari lembaga survey yang dimenangkan oleh Jokowi dan Jokowi bersih keras dengan kevalidan quick countnya. Ketiga membuat keputusan moral/Make Moral Judgement, dari Kedua Kubu Capres menjadi pusat perhatian dengan segala cara untuk mempertahankan kebenarannya. Keempat Menekankan penyelesaian/Treatment Recommendation, Media Online Tempo.co telah memaparkan sejelasa mungkin bagaimana problem dari kedua kubu.

## **Referensi**

- Ardianto, Elvinaro. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bandur, Agustinus. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014
- Canggara, Hafied. Komunikasi Politik : Konsep. Teori dan Strategi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Djuroto, Totok. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung : PT Rosdakarya, 2002.
- Eriyanto. Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKIS, 2002
- HM, Zaenuddin. The Journalist. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014
- J Heru, Margianto dan Syaefullah. Pembaca, Laba, dan Problematika Praktik Jurnalistik Online di Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2011
- Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Masudi, Wawan, Fenomena Politik Cebong dan Kampret di Indonesia, 2018
- Moedzakir, M Djauzi. Desain dan Model Penelitian Kualitatif, Malang: UNM, 2010
- Morissan,., Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Rosady, Ruslan. Praktik dan Solusi Public Relation dalam Situasi Krisis dalam Pemilihan Citra, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Septiawan, Santana. Jurnalisme Investigasi. Jakarta : Yayasan Obor, 2009.
- Sobur, Alex. Analisis Teks Media. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sopiyan, Agus dkk, Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009
- Sumadiria, Haris. Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Steele, Janet. Wars Within: The Story of Tempo an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing, 2005.
- Tambuaraka, Apriadi. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Elina Flora, 2014, Analisis Framing Berita Calon Presiden RI 2014 - 2019 Pada Surat Kabar Kaltim Post Dan Tribun Kaltim, No 3, Vol 2.
- Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Referensi. Jurnal Politik Profetik. Vol.3.No.1
- Frenki. Jurnal Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyash. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Hamdan, 2014. Analisis Framing Berita Perseteruan KPK dan POLRI di Media Kompas.com dan Vivanews.com.

- Mitra Bestari. Membangun Konstitusional Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Jurnal Pkk Universitas Kanjuruhan Malang: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Muhammad Rizal. 2015. Analisis Framing Pemberitaan Politik Capres dan Cawapres di Media Sosial pada Akun Detik.com
- Ratna, Herawati. (2018). Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia. Universitas Negeri Semarang. Vol.4. No.3
- Rusli Ramli. 2011. Analisis Framing Berita Headline Harian Fajar dan Tribun Timur dalam Pemilihan Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan 2009-2014
- Sophia Damayanti dkk, 2016. Analisis Framing Robert N. Entman atas pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta di Majalah Tempo.
- [https://KPU.go.id/](https:// KPU.go.id/) Diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.32 WIB
- <http://www.chartapolitika.com/rilis-survei-nasional-pileg-2019-pemilu-yang-terlupakan/> Diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 08.27 WIB
- <https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah> Diakses pada tanggal 11 April 2019 Pukul 08.50 WIB